



TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

KATA PENGANTAR

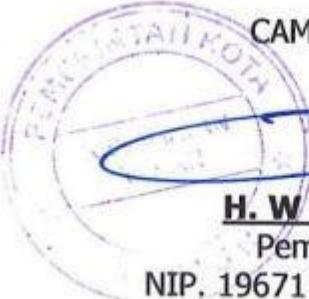
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 Kecamatan Taman Kota Madiun dapat diselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara pimpinan dan seluruh staf dilingkungan kerja Kecamatan Taman untuk penyusunan laporan ini.

Laporan Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program kerja tahun 2021. Selanjutnya Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan serta peningkatan kinerja Kecamatan Taman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan program kerja pada tahun berikutnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan ini, dan kami berharap kritik serta saran yang bersifat membangun untuk laporan selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun, dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, Januari 2022

 CAMAT TAMAN

H. WAHYUDI
Pembina Tk. I
NIP. 19671106 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.	1
1.2.	1
1.3.	3
1.4.	3
1.	3
2.	5
3.	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A.	8
1.	8
2.	8
B.	8
1.	10
2.	10
3.	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A.	14
B.	22
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk di wilayah Kecamatan Taman	6
Tabel 2 Sasaran dan Indikator Sasaran	8
Tabel 3 Program Kerja Kecamatan Taman	9
Tabel 4 Kegiatan Kecamatan Taman	9
Tabel 5 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja	10
Tabel 6 Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2021	11
Tabel 7 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir	11
Tabel 8 Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah	12
Tabel 9 Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja	12
Tabel 10 Hasil Pengukuran Efisiensi Kinerja	13
Tabel 11 Program Penunjang	13
Tabel 12 Realisasi dan Serapan Anggaran Tahun 2021	13
Tabel 13 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Taman	4
Gambar 2 Peta Wilayah Kecamatan Taman	6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja pada bab pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan penyusunan serta gambaran umum struktur organisasi dan unsur kewilayahan di Kecamatan Taman Kota Madiun.

Keadaan dan kondisi tersebut mempengaruhi rencana strategis dan kinerja untuk menentukan sasaran dan indikator dalam perencanaan penganggaran APBD dan APBD Perubahan Kecamatan Taman Tahun 2021.

Kecamatan Taman melaksanakan kinerja yang dibiayai berdasarkan APBD dan P-APBD Tahun 2021. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat efisiensi anggaran.

Demikian ringkasan Laporan Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2021, dengan harapan dapat memberikan gambaran umum kinerja yang telah dicapai Kecamatan Taman.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya instansi pemerintah untuk mengadakan perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai konsistensi terhadap komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Kecamatan Taman Kota Madiun dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban Kecamatan Taman Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Taman Tahun 2019 – 2024.

B. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;

- 5) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 11) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 12) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang RPJMD 2019-2024;
- 13) Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- 14) Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Th 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 15) Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
- 16) Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Taman Tahun 2021 mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana target dan capaian kinerja kegiatan dalam satu tahun anggaran (tahun 2021)
- 2) Sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Taman Tahun 2021.
- 3) Sebagai evaluasi kinerja sehingga dapat diketahui target kinerja yang sudah terpenuhi maupun yang belum terpenuhi.
- 4) Mengetahui target kinerja yang terukur pencapaiannya.

D. GAMBARAN UMUM

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

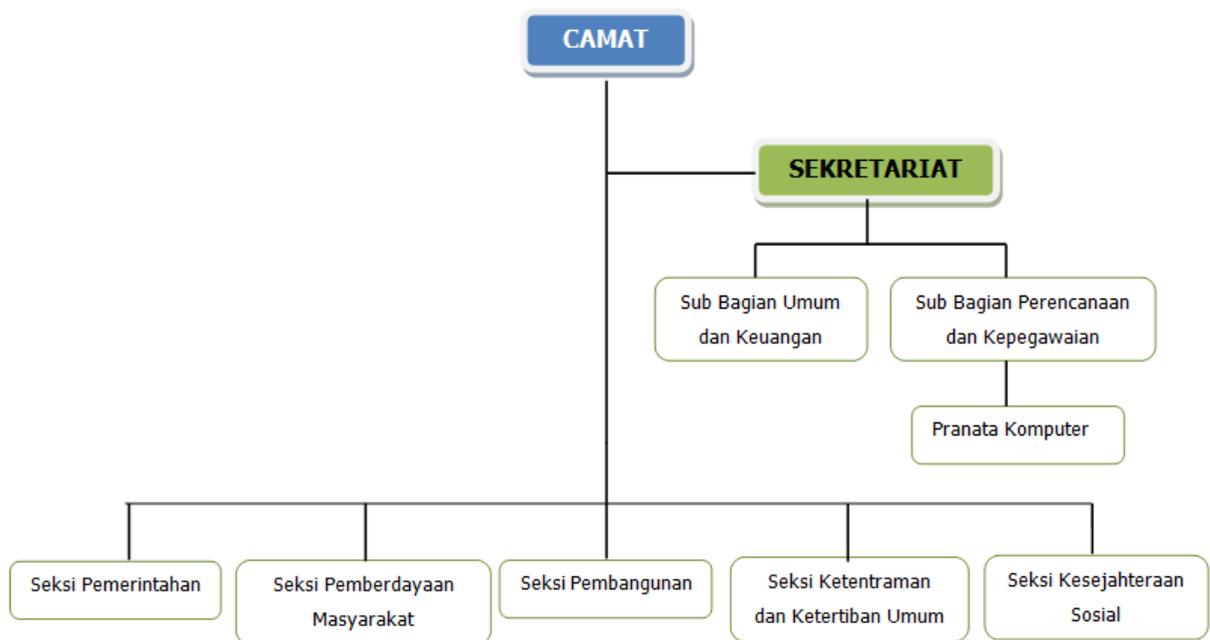
- a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; dan
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Taman berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan digambarkan pada bagan berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Taman

Kondisi Wilayah

Kecamatan Taman secara geografis memiliki wilayah 12,46 Km yang merupakan bagian dari Wilayah Kota Madiun yang terletak pada koordinat 111⁰ sampai 112⁰ bujur timur dan 7⁰ sampai 8⁰ lintang selatan, yang secara administrative mempunyai 9 wilayah kerja di 9 kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Mojorejo ;
- b. Kelurahan Pandean ;
- c. Kelurahan Bajarejo ;
- d. Kelurahan Kuncen ;

- e. Kelurahan Manisrejo ;
- f. Kelurahan Kejuron ;
- g. Kelurahan Josenan ;
- h. Kelurahan Demangan dan
- i. Kelurahan Taman.

Kecamatan Taman Kota Madiun memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Kartoharjo
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Dagangan dan Geger Kabupaten Madiun
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Manguharjo
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

PETA WILAYAH KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN



Gambar 2 Peta Wilayah Kecamatan Taman

Secara administratif Kecamatan Taman terbagi dalam 9 wilayah Kelurahan, dengan luas wilayah 12,46 Ha yang terbagi dalam 394 RT dan 105 RW. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumlah penduduk Kecamatan Taman pada akhir tahun 2021 mencapai 87.971 jiwa dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk di wilayah Kecamatan Taman

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH RT / RW		JUMLAH PENDUDUK	
		Ha	%	RT	RW	JENIS KELAMIN	
						LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	MOJOREJO	1,26	10,11	64	14	5.553	5.955
2	PANDEAN	0,92	7,38	60	18	5.068	5.311
3	BANJAREJO	1,83	14,69	33	8	4.592	4.484
4	KUNCEN	0,32	2,57	9	4	689	729
5	MANISREJO	3,02	16,21	60	12	7.900	8.224
6	KEJURON	1,59	12,76	50	15	4.611	5.043
7	JOSEMAN	1,54	12,36	31	9	3.668	3.699
8	DEMANGAN	1,92	15,41	36	10	4.706	4.885
9	TAMAN	1,06	8,51	51	15	6.301	6.553
	JUMLAH	12,46	100,00	394	105	43.088	44.883
JUMLAH TOTAL PENDUDUK						87.971	

Sumber : <http://capil.madiunkota.net/>

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tujuan

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi. Berdasarkan Misi yang telah diuraikan, Kecamatan Taman menetapkan tujuan berikut :

MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Baik.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan Kecamatan Taman menetapkan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan

Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman

B. RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Kecamatan Taman Tahun 2019-2024 dijabarkan secara bertahap dalam Rencana kinerja Tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target yang telah disepakati bersama dengan kerangka pendanaan masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 24.022.408.348,- (*Dua Puluh Empat Milyar Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus*

Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2021 sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kartoharjo 2021.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kecamatan Taman 2021 merupakan perjanjian kinerja antara Camat Taman Kota Madiun dengan Walikota Madiun untuk mewujudkan komitmen atas rencana target kinerja yang seharusnya dicapai pada tahun 2021 dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kecamatan Taman Tahun 2019-2024. Perjanjian kinerja tersebut ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil dan merupakan tolok ukur keberhasilan Kecamatan Kartoharjo pada tahun 2021. Ringkasan perjanjian kinerja diuraikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,01 (skor)
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan	100 %
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	33

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dari Indikator-indikator Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah :

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Sasaran

Uraian	Indikator	Rumus
1	2	3
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP dari Inspektorat Kota Madiun
2. Meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	2 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang terselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan rekomendasi}} \times 100\%$
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Kartoharjo	3 Prosentase usulan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah usulan 9 Kel \& Kec dalam RKPD}}{\text{Jumlah Usulan 9 kelurahan \& Kecamatan}} \times 100\%$

2. Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur (*outcome*) sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*). Kegiatan terdiri dari satu atau dua Sub Kegiatan dan dan pagu anggaran adalah sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja Sasaran

No	Uraian Program dan Kegiatan	Pagu Sesudah
	KECAMATAN TAMAN	24,022,408,348
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,964,523,606
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58,967,520
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58,967,520
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,388,384,545
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,388,384,545
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,412,175
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7,412,175
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,657,809,351
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,639,787,350
4.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18,022,001
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	651,828,265
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	651,828,265
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,121,750
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63,621,750
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36,500,000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,112,850,452
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8,046,209,512
1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mojorejo	887,479,738

No	Uraian Program dan Kegiatan	Pagu Sesudah
1.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pandean	950,773,030
1.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Banjarejo	817,422,187
1.4	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kuncen	521,179,707
1.5	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Manisrejo	1,142,104,310
1.6	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Josenan	915,300,135
1.7	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kejuron	845,179,616
1.8	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Demangan	1,060,739,039
1.9	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Taman	906,031,750
2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	66,640,940
2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	66,640,940
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,373,446,350
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3,373,446,350
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	254,851,690
1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	240,945,140
1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo	262,354,000
1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manisrejo	398,000,000
1.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	201,085,970
1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron	239,935,000
1.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	209,968,000
1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman	439,780,000
1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojorejo	250,000,000
1.10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean	165,775,500

No	Uraian Program dan Kegiatan	Pagu Sesudah
1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manisrejo	260,125,750
1.12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Josenan	250,000,000
1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kejuron	200,625,300
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	456,693,990
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	156,537,190
1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	156,537,190
2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	300,156,800
2.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	300,156,800
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	114,893,950
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	114,893,950
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	41,385,330
1.2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47,695,660
1.3	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	25,812,960
TOTAL		24,022,408,348

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing – masing indikator kinerja sasaran untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan kinerja pemerintahan dalam melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja Kecamatan Taman tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah seluruh indikator baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator sasaran Kinerja. Dalam mengadakan pengukuran kinerja dimungkinkan terdapat capaian kinerja yang sama dengan target atau lebih besar dari target tetapi ada pula yang lebih rendah dari target. Terhadap hal tersebut kami telah mengadakan analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

❖ Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

❖ Metode Penyimpulan Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

No.	Kriteria Pengukuran	Predikat
1.	$X \geq 100\%$	Sangat Baik
2.	$85\% \leq X \leq 100\%$	Baik
3.	$60\% < X < 85\%$	Cukup Baik
4.	$X \leq 60\%$	Kurang Baik

1. REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021

Berikut ini disajikan pernyataan Kinerja Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2021 dan Renstra Tahun 2019-2024 Kecamatan Taman Kota Madiun, beserta analisis capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2021

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2021	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,01(skor)	80,49 Skor	100,60%	Sangat Baik
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Baik

3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	33%	11%	33%	Kurang Baik
---	--	---	-----	-----	-----	-------------

Tabel 3.2 tersebut menunjukkan bahwa 2 (dua) Sasaran Perjanjian Kinerja seluruhnya terealisasi melampaui target, dengan capaian kinerja indikator Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,60%, indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%, sedangkan indikator Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan Taman sebesar 33% sehingga secara keseluruhan 3 indikator tersebut rerata capaian kinerja sebesar 77,98%.

Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Taman yang tercapai sebesar 80,49 termasuk dalam predikat **A** dengan intrepetasi **Memuaskan**. Artinya Kecamatan Taman dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 yang ada di Kelurahan. Seluruh rekomendasi penilaian SAKIP telah ditindak lanjuti dan selalu menjadi bahan perbaikan kedepan dalam penerapan manajemen kinerja agar menjadi lebih baik.

Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100% menunjukkan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Taman dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Selain itu pembinaan pemerintahan di Kelurahan juga berjalan cukup baik.

Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan Taman sebesar 33%. Artinya 3 Kelurahan yang ditargetkan untuk mendapatkan klasifikasi swasembada hanya 1 Kelurahan yang tercapai. Sedangkan yang lainnya mendapatkan predikat swakarya dengan nilai 0,78 yang seharusnya 0,80. Dengan hasil ini Kecamatan Taman akan melakukan evaluasi secara berkala dan periodik demi tercapainya target dan memastikan setiap variabel dan indikator dapat terisi secara optimal.

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Berikut ini disajikan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu, yaitu tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu
serta beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	80,49 Skor
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	0%	22%	11%

Tabel 3.3 tersebut menunjukkan bahwa Sasaran Perjanjian Kinerja mengalami perubahan, pada tahun Indikator Kinerja Sasaran untuk Kecamatan Taman hanya 2 (dua) indikator yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan indikator Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada.

Perbandingan Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara tahun ini dan tahun lalu selalu terpenuhi 100%. Sedangkan untuk Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada mengalami penurunan.

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Renstra 2019 – 2024

Berikut ini disajikan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Target Renstra 2019 – 2024 sebagaimana Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Tahun Ini dan
Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi Sampai Dengan Tahun 2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	80,49 Skor
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman	Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	55%	11%

Tabel 3.4 tersebut menunjukkan bahwa telah ditetapkan Target Akhir Renstra Periode 2019-2024. Indikator Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 80,49 dan sudah memenuhi target akhir Renstra yaitu predikat **A Skor** dengan intepetasi **Memuaskan**. Karena akuntabilitas kinerja memiliki target akhir Renstra yang tinggi, maka dari itu perbaikan kinerja terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga kinerja tidak hanya diatas kertas, namun perubahan kinerja harus dipimpin agar terwujud pemerintahan berorientasi hasil.

Indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terealisasi sebesar 100% dan akan tetap dipertahankan sebagai wujud upaya Kecamatan Taman daalm meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

Sedangkan untuk Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada mengalami penurunan pada tahun ini, akan dilaksanakan evaluasi dan perbaikan pada seluruh variabel dan indikator di dalam aplikasi Prodeskel demi tercapainya target 5 Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada.

2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN

Telah dilakukan pengukuran kinerja melalui perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun ini, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra. Dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- a. Realisasi Kinerja tahun ini telah secara keseluruhan sebesar 77,98% dengan predikat **Cukup Baik**;
- b. Realisasi Kinerja tahun ini **turun** dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dikarenakan adanya tambahan indikator dan tidak tercapainya target pada indikator Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada;
- c. Kinerja strategis tahun ini perlu ditingkatkan demi tercapainya target akhir Renstra secara optimal.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Taman dalam mencapai Realisasi Kinerja yang ditargetkan untuk tahun ini mengalami penurunan, dikarenakan terdapat salah satu sasaran strategis yang tidak tercapai. Hal tersebut menjadi pemacu Kecamatan Taman untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada demi mengejar ketertinggalan target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2019 – 2024.

2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pada Indikator Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Taman yang tercapai sebesar 80,49 termasuk dalam predikat **A** dengan interpetasi **Memuaskan**. Realisasi kinerja Nilai SAKIP tahun ini telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu 80,01 dan telah naik dibanding realisasi kinerja tahun lalu, namun masih belum melampaui target kinerja akhir Renstra.

Kecamatan Taman telah menunjukkan bahwa kerja keras dan komitmen mampu merubah hasil yang memuaskan dari tahun kemarin. Dari lima komponen SAKIP yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah di Perencanaan Kinerja & Pencapaian Kinerja, sehingga nilai akhir naik dari 78,12 menjadi 80,51. Untuk tiga komponen lainnya akan menjadi perhatian dalam peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP kedepannya.

2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pada Indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terealisasi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terealisasi terealisasi 100% dan menunjukkan bahwa kegiatan yang diampu oleh Kecamatan Taman dapat berjalan sesuai rencana **Sangat Baik**. Bisa dikatakan jika seluruh rekomendasi dan koordinasi seluruh bidang yang ada di Kecamatan Taman sebagai pelayan masyarakat berjalan lancar dan terselesaikan.

2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pada Indikator Persentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada

Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada merupakan salah satu target Kecamatan Taman yang melibatkan Kelurahan. Indikator tersebut merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan sebuah Kelurahan dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat serta pengisian aplikasi prodeskel sebagai bentuk pelaporan kelurahan kepada Pemerintah Pusat. Dikarenakan untuk tahun ini target tidak tercapai maka dari itu perlu diadakan evaluasi lebih mendalam terhadap komponen atau variabel yang mempengaruhi hasil klasifikasi kelurahan.

Tabel 3.5

Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja

No	Sasaran Strategis	Keterangan	Penyebab	Solusi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Berhasil mencapai target		Lebih meningkatkan kinerja
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Berhasil mencapai target		Lebih meningkatkan kinerja
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman	Terjadi penurunan dari tahun lalu	- Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan instansi	- Lebih optimalkan partisipasi masyarakat - Meningkatkan koordinasi antara masyarakat dengan instansi

3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari hasil analisa pengukuran kinerja Kecamatan Taman Tahun 2021 dan hasil analisa Realisasi Anggaran Kecamatan Taman Tahun 2021, maka dapat diukur efisiensi Kinerja Kecamatan Taman untuk mengetahui Akuntabilitas atau tingkat efisiensi dalam pencapaian target kinerja, yaitu hasil rata – rata capaian kinerja dikurangi dengan % Realisasi/ Serapan Anggaran atau dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \text{Rata-rata capaian kinerja} - \% \text{ Serapan Anggaran}$$

Apabila hasil perhitungan Efisiensi kurang dari 1 maka penyerapan anggaran kurang efisien dan apabila hasilnya lebih dari 1 maka penyerapan anggaran sudah efisien. Hasil dari Perhitungan tingkat efisiensi Anggaran Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah Realisasi Anggaran untuk Mendukung Sasaran Strategis sebagaimana Tabel 3.6. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Efisiensi pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Tingkat Efisiensi **4,06**. Efisiensi Sasaran meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Taman dengan Tingkat Efisiensi **6,65**. Efisiensi pada Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman dengan Tingkat Efisiensi **8,87**. Artinya Efisiensi terjadi pada semua indikator kinerja sebagaimana Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

Hasil Pengukuran Efisiensi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Alokasi	Realisasi	Rata-rata Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	% Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	11.964.523.606	11.479.124.249	100%	95,94 %	4,06%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	8.112.850.452	7.573.735.766	100%	93,35 %	6,65%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman	3.945.034.290	3.784.240.619	100%	91,13%	8,87%

4. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di Kecamatan Taman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Program Penunjang

No.	Sasaran Strategis	Program yang menunjang
1	2	3
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja Organisasi, didukung oleh Pagu Anggaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. **Tabel 3.8** menunjukkan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 yang terbagi menjadi 5 Program dalam mendukung pencapaian sasaran Kinerja dengan tingkat realisasi rata – rata diatas 91%. Serapan anggaran tersebut sebisanya akan lebih ditingkatkan lagi demi optimalisasi tercapainya kinerja Kecamatan Taman. Pada tahun selanjutnya penganggaran dievaluasi setiap bulan berdasarkan Rencana Anggaran Kas (RAK). Realisasi anggaran dan serapan yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi dan Serapan Anggaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Program	Alokasi	Realisasi	% Serapan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.964.523.606	11.479.124.249	95,94 %
Jumlah			11.964.523.606	11.479.124.249	95,94 %

2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.112.850.452	7.573.735.766	93,35 %
Jumlah			8.112.850.452	7.573.735.766	93,35 %
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.373.446.350	3.257.850.541	96,57 %
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	456.693.990	431.899.833	94,57 %
5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	114.893.950	94.490.245	82,24 %
Jumlah			3.945.034.290	3.784.240.619	91,13%

Tabel 3.9

Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi
Kecamatan Taman		
KECAMATAN	24.022.408.348	22.837.100.634
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.964.523.606	11.479.124.249
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.967.520	55.444.217
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.967.520	55.444.217
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.388.384.545	9.066.708.778
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.388.384.545	9.066.708.778
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.412.175	7.412.175
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.412.175	7.412.175
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.657.809.351	1.525.849.035
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.639.787.350	1.525.849.035
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.022.001	17.893.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	651.828.265	649.156.220
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	651.828.265	649.156.220
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.121.750	174.553.824
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.621.750	40.129.124
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.985.500

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.500.000	34.439.200
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.112.850.452	7.573.735.766
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.046.209.512	7.512.137.381
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mojorejo	887.479.738	835.888.115
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pandean	950.773.030	881.330.842
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Banjarejo	817.422.187	774.105.451
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kuncen	521.179.707	486.173.652
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Manisrejo	1.142.104.310	1.055.036.927
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Josenan	915.300.135	850.646.259
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kejuron	845.179.616	802.834.759
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Demangan	1.060.739.039	1.024.852.655
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Taman	906.031.750	801.268.721
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	66.640.940	61.598.385
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	66.640.940	61.598.385
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.373.446.350	3.257.850.541
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.373.446.350	3.257.850.541
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	254.851.690	224.783.561
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	240.945.140	235.240.750
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo	262.354.000	261.573.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manisrejo	398.000.000	394.551.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	201.085.970	196.648.273
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron	239.935.000	231.611.625
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	209.968.000	207.973.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman	439.780.000	438.031.002,29
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojorejo	250.000.000	243.381.925
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean	165.775.500	163.169.250
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manisrejo	260.125.750	260.125.650
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Josenan	250.000.000	218.632.035
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kejuron	200.625.300	182.129.470
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	456.693.990	431.899.833
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	156.537.190	146.482.225
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	156.537.190	146.482.225

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	300.156.800	285.417.608
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	300.156.800	285.417.608
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	114.893.950	94.490.245
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	114.893.950	94.490.245
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	41.385.330	39.211.406
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47.695.660	30.173.913
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	25.812.960	25.104.926

Seluruh Anggaran yang terdapat pada Sub Kegiatan di Kecamatan Taman sedapatnya digunakan sebagai sarana mencapai target Sasaran Perangkat Daerah, sehingga diharapkan akan berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Pada Tabel 3.9 menunjukkan dukungan realisasi anggaran terhadap sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai upaya untuk mendukung Sasaran Strategis Kota Madiun yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan komitmen Kecamatan Taman dalam upaya melaksanakan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Laporan Kinerja Kecamatan Taman Kota Madiun Tahun 2021 juga merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap seluruh sasaran sebagaimana tertuang dalam perencanaan Strategis Kecamatan Taman diperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Taman secara keseluruhan pada dasarnya telah dapat memenuhi target tetapi terdapat satu sasaran yang belum tercapai yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kecamatan Taman dengan indikator Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan Taman. Dengan begitu, indikator yang capaiannya belum sebagaimana yang diharapkan, dan masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Terhadap pelayanan di Kecamatan Taman yang masih memerlukan perhatian atau masih menjadi masalah antara lain :

1. Masih rendahnya angka Indeks Pelayanan Publik.
2. Sarana dan prasarana kelurahan kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat
3. Terbatasnya kualitas SDM di kecamatan dan kelurahan.
4. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas kader-kader pembangunan atau partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
5. Belum optimalnya koordinasi antar instansi dan masyarakat.

Langkah – langkah yang perlu diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan di Kecamatan Taman guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Taman antara lain :

1. Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat sehingga menciptakan kepuasan pada masyarakat.
2. Peningkatan sarana dan prasarana, pada bidang infrastruktur pembangunan lebih dikonsentrasikan pada lokasi yang berdekatan dengan hunian penduduk. Kebijakan

pembangunan selokan, drainase dan fasilitas umum lainnya lebih diarahkan yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dan bisa dirasakan langsung, disamping kesediaan sarana pelayanan yang dapat mendatangkan kepuasan masyarakat.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, karena pelayanan publik senantiasa berhubungan langsung dengan warga yang beragam (baik ekonomi dan strata pendidikannya), maka petugas pelayanan juga harus memiliki kemampuan melayani secara baik. Untuk menghilangkan kesan bahwa cara melayani kurang sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan Taman adalah penguatan pola pembangunan partisipatif. Hal ini merupakan bagian dari upaya masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas usulan-usulan dalam program dan kegiatan pembangunan. Melalui usulan terhadap pelaksanaan pembangunan akan bermuara pada peningkatan kualitas peran dalam menjaga konsistensi terhadap visi dan misi Kota Madiun.
5. Meningkatkan koordinasi antara masyarakat dengan instansi agar pelayanan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Matriks Renstra

B. Perjanjian Kinerja Perubahan 2021

C. Ringkasan Pengukuran Kinerja

D. Lampiran lainnya, penghargaan dll.